

EDUCATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PENGUATAN INTEGRITAS SDM EKOWISATA KABUPATEN KEP. SERIBU MENUJU PARIWISATA BERBASIS SMART DESTINASI

*Dinda Rakhma Fitriani
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No 100, Depok
dinda_rf@staff.gunadarma.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan model peningkatan kapasitas dan kompetensi komunikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkup pengembangan kawasan ekowisata. Melalui penggunaan teori Struktural Fungsional (Jones, 2009), dan Teori Klitgaard dan Ramirez Torres (1991) sebagai teori substantif, dengan pendekatan studi kasus dengan kategori multiple case study. Model yang dihasilkan melalui penelitian ini, mampu menjadi dasar pengembangan kapasitas dan kompetensi komunikasi SDM Kep. Seribu, agar dapat menjadi destinasi industri pariwisata yang bersih dan humanis, serta mampu memberi kesejahteraan pada warga lokal, melalui edukasi dan pendidikan karakter agar warga dan stakeholder mampu berdaya dengan potensi maritim yang dimiliki untuk diproyeksikan sebagai aset nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan kapasitas dan kompetensi komunikasi SDM berbasis ekowisata dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata pada wilayah Kabupaten Kep. Seribu berbasis smart destinasi. Empat aspek dalam implementasi dan pengembangan, yakni Adaptasi (A), Pencapaian tujuan atau goal attainment (G), Integrasi (I), dan Latensi (L), wajib dimiliki oleh sistem sosial di wilayah Kep. Seribu, agar masyarakat tetap mampu bertahan (survive), sejalan dengan perubahan aspek sosial kemasyarakatan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Kep. Seribu, yang menjadi target dilaksanakannya pembangunan di sektor kepariwisataan.

Kata kunci: Education sustainable development, komunikasi pariwisata, Sumber Daya Manusia, Kep. Seribu, smart destinasi

ABSTRACT

This research aimed to produce the increasing model capacity and the competence of human resources communication within the scope of the development of ecotourism areas. This research used the Structural-Functional theory by Jones (2009), following the Substantive theory by Klitgaard and Ramirez Torres (1991). The method used was the multiple-case study approach. The model generated through this research became the basis for the increasing model capacity and the competence of human resources communication in Kep. Seribu. Thus, it can be one of many destinations in the tourism industry that is not only cleaner and humaner, but also able to provide welfare for the local citizens through education and character education. In this way, both citizens and stakeholders can empower the maritime potential of the islands to be projected national assets. The results showed that the increasing model capacity and the competence of human resources communication with ecotourism-based were needed in developing the regency through the smart destinations. According to the results, there are four implementation and development aspects consisted of Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), and Latency (L) that must be owned by the social systems in the regency for their people to survive, in line with the changes in social aspects of society that occur in the areas which becomes the implementation targets of development in the tourism sector.

Keywords: Education sustainable development, tourism communication, human resources, Kep. Seribu, smart destination.

PENDAHULUAN

Tahun 2020-2024 pemerintah Indonesia, melalui Kemenparekraf, mencanangkan 10 destinasi wisata yang menjadi sektor prioritas. Sektor prioritas disusun sebagai upaya serius untuk pengembangan sektor pariwisata nasional, yang meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pangan, mineral/energi, maritim/bahari, hingga kawasan industri.

Beberapa negara maju seperti Malaysia, Singapura, Korea selatan sebagai Negara terdekat gencar melakukan promosi pariwisata di tanah air. Berbagai paket wisata dan program kompetitif ditawarkan dengan kekuatan daya tarik wisata alam dan belanja. Menyikapi persaingan dalam upaya mendatangkan devisa dari sektor wisata, pemerintah mulai menggarap potensi wisata alam yang kaya di berbagai wilayah tanah air. Pariwisata kini diposisikan sebagai aspek strategis, serta menjadi program yang mengintegrasikan kegiatan antar sektor pengembangan nasional. Hal inilah yang menjadi landasan dijadikannya pariwisata sebagai aspek dan sektor penggerak pembangunan dan perekonomian bangsa.

Terdapat dua parameter dalam menggenjot devisa negara dari sektor pariwisata, melalui: (1) Peningkatan jumlah destinasi dan investasi bidang pariwisata di Indonesia, serta menjadikan pariwisata sebagai salah satu faktor utama, peningkatan ekonomi, pertumbuhan lapangan pekerjaan baru, hingga pengembangan dalam bidang infrastruktur. Sebagai aspek yang di-

prioritaskan, pariwisata memberikan PDB 2016-2019 dengan jumlah yang terus meningkat. Merujuk pada sumber Kementerian Pariwisata, sebelum memasuki masa pandemic Covid-19, pariwisata memberikan kontribusi PDB lebih dari 261 T, menjadi 461 Triliun. Selain itu, pariwisata berkontribusi sebagai penyumbang devisa lebih dari 7.603 juta dollar pada tahun 2010, dan bertambah menjadi lebih dari 12.225 juta dollar (Kemenparekraf, 2019). Selain itu, aspek pariwisata berkontribusi dalam penyediaan dan penyerapan tenaga kerja dari yang sebelumnya 4 juta, meningkat menjadi 12,1 juta tenaga kerja, atau sebesar 10,6% dari total tenaga kerja nasional. (2) Pariwisata mengalami berkembang secara masif dan menjadi salah satu sektor penopang perekonomian terbesar dan mengalami pertumbuhan tercepat bagi banyak negara di dunia. Hal ini terlihat dari konsistensi peningkatan jumlah orang yang melakukan perjalanan wisata dari waktu ke waktu, walaupun krisis ekonomi secara global melanda.

Salah satu potensi wisata yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah wisata alam. Mengingat sumber daya alam berupa pantai, laut yang tergolong kawasan maritim di seluruh kepulauan Indonesia belum tergali sebagai kawasan wisata nasional. Beberapa objek tujuan wisata nasional, juga belum sepenuhnya memiliki standar SOP wisata yang terkonsep secara baik karena kurangnya edukasi di bidang

pelayanan dan integritas stakeholder sekaligus *support sistem* wisatanya. Melihat pada potensi dan dampak yang muncul dari kawasan ekonomi khusus tentu tidak semata pada upaya promosi infrastruktur kawasan obyek wisatanya. Diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan kompetensi, serta memiliki integritas baik serta kredibel dalam menjalankan misi nasional untuk terus mampu menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai penjuru.

Oleh karenanya diperlukan perencanaan bagi peningkatan kualitas pelayanan yang membuat wisatawan nyaman, aman dan menemukan hal baru sebagai tujuan sebuah pengalaman berwisata. Berpijak pada situasi ini, maka peneliti melihat peluang membangun pendidikan penguatan pelayanan pada sektor pariwisata yang berpijak pada *service excellent* terkait keramahan, kejujuran, sikap terbuka dan kemampuan beradaptasi. Penelitian ini menempatkan satu wilayah di Kep. Seribu karena secara institusional pernah terjalin kerjasama untuk peningkatan potensi pariwisata kabupaten tersebut.

Terpilihnya kabupaten Kep. Seribu sebagai lokasi penelitian mengingat lokasi ini terpisah dari ibukota negara yang secara administratif masuk sebagai bagian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tingkat kunjungan wisata yang cukup baik bahkan sebagai kawasan destinasi nasional dan internasional di luar DKI Jakarta. Kabupaten Kep. Seribu yang memiliki lebih dari 110 pulau, yang banyak dikunjungi wisatawan

karena setiap pulau mempunyai karakteristik wisata yang berbeda walaupun semuanya menampilkan pesona pantai dan keindahan bawah lautnya (Aditya, 2020).

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Puji Hastuti, menyatakan Keindahan alam yang dimiliki, membuat Kep. Seribu dikunjungi 37 ribu lebih wisatawan lokal dan mancanegara. Jumlah wisatawan menurun sebanyak 335 pada masa pandemi Covid-19 menurun, namun diprediksi jumlah kunjungan wisata akan meningkat kembali setelah pandemi Covid-19 berakhir (Sembiring, 2021). Fasilitas pendukung wisata di pulau seribu terus ditingkatkan oleh pemerintah setempat, diantaranya fasilitas akomodasi yang telah tersedia, yang tersebar di tujuh pulau, yakni Pramuka, Untung Jawa, Kelapa, Tidung, Harapan, Pari dan Lancang. Selain beberapa pulau yang menjadi destinasi wisata, terdapat juga pulau-pulau kecil yang menjadi daya Tarik wisatawan, dan terus berkembang dan memberikan *multiplier effect* positif terhadap pertumbuhan ekonomi sosial kemasyarakatan, hingga peningkatan pendapatan daerah (PDB).

Potensi Investasi

Pemkab Kep. Seribu membuka peluang dalam cakupan yang masif kepada seluruh investor untuk melakukan investasi bisnis di Kep. Seribu. Masih terdapat potensi ekonomi seperti sektor wisata yang belum terkelola dengan baik dan maksimal di Kep. Seribu, hal ini menjadi pengembangan

peluang investasi. sesuai dengan data yang dihimpun peneliti melalui observasi, pihak pemerintah Kep. Seribu memberikan dan menerapkan banyak sekali kemudahan pelayanan, terkait dengan perizinan terintegrasi serta birokrasi yang tidak mempersulit setiap investor yang akan berinvestasi dan mengembangkan bisnis pada sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Investasi sektor pariwisata bisa dilakukan pada wilayah yang memiliki luas keseluruhan sebesar 7.005,76 km² serta penduduk sebanyak 23.054 jiwa. Pihak Pemkab Kep. Seribu, terus berupaya memberikan berbagai layanan dan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Investasi ini dibutuhkan pula sebagai upaya menaikkan kompetensi sumber daya manusia, sekaligus dapat dipercaya sebagai peningkatan integritas petugas baik di jajaran pemerintahan juga warga setempat yang terintegrasi dengan revolusi mental sebagai upaya pengurangan korupsi berupa pungli serta suap di daerah Kep. Seribu.

Pemerintah Kab Kep. Seribu saat ini telah mengajukan surat permohonan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kelanjutan pembangunan Bandara Panjang di Pulau Panjang. Pemkab telah mengajukan rekomendasi pembangunan Bandara Panjang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga investor. Mengutip dari portal resmi pulauseribu.go.id pada 20 Agustus 2019, saat ini landasan pacu telah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta

sepanjang 600 m, akan diperpanjang menjadi 1500 hingga 2000 m, dengan bantuan investor (Petrus, 2019). Jika luas bandara bertambah, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kep. Seribu. Pemerintah Kab Kep. Seribu senantiasa berusaha agar Bandara Panjang berkembang menjadi bandara berstandar Internasional. Pemda Kep. Seribu juga terus berusaha mengembangkan transportasi bahari lainnya, yang terus dimodernisasi menuju destinasi ke Kep. Seribu, dengan harapan dapat menarik jumlah wisatawan baik dalam dan luar negeri, serta meningkatkan jumlah *length of stay* wisatawan yang hadir.

Potensi dan Tantangan Investasi

Sektor usaha dan para pengusaha, menganggap Kep. Seribu masih memiliki kesempatan ekonomi massif, jika dikelola secara dengan baik. Hal ini juga diharapkan mampu mendukung geliat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi lokal, provinsi dan diharapkan mampu menjadi penguat ekonomi nasional yang dapat berdikari, hal ini sangat mungkin terwujud, jika dikelola dengan baik melalui pembentukan otorita khusus menangani sektor pariwisata. Jika pemerintah setempat melakukan pengelolaan Kep. Seribu akan mampu menaikkan jumlah investasi dan kemajuan secara menyeluruh di kawasan kepulauan tersebut. Terkait pengelolaan wilayah ini, maka berbagai keperluan yang berkenaan dengan pengurusan birokrasi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Upaya mendorong pembangunan demi kemajuan pulau seribu sejalan dengan program revolusi mental sebagai acuan untuk meningkatkan pariwisata yang ramah alam berbasis ekowisata dengan pendekatan pada pendidikan berkelanjutan bagi seluruh stakeholder di Kep. Seribu. Salah satunya dengan cara masyarakat mulai mencintai potensi pulau yang mereka huni. Aspek utama dari revolusi mental lainnya adalah warga harus terlihat ramah dan memberi rasa aman pada wisatawan karena Kep. Seribu kini sudah menjadi destinasi wisata internasional. Revolusi mental itu juga menyentuh efektifitas kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kep. Seribu yakni dengan memperkuat wilayah menggali potensi hingga merealisasikan berbagai program pemerintah yang harus mengacu pada tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat Pulau Seribu. Pembangunan di Kep. Seribu tidak hanya sebatas infrastrukturnya, namun yang paling penting adalah mental masyarakat harus lebih baik termasuk aparaturnya yang bebas pungutan liar (Pungli). Pemerintah kini melalui berbagai kegiatan di lingkup pemerintahan gencar mengkampanyekan gerakan bersih, gotong royong dan revolusi mental secara konstruktif bagi masyarakat. Saat ini pemerintah terus mengkampanyekan dengan mengingatkan warga Pulau Pari untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengunjung yang datang ke Pantai Perawan, Pulau Pari, Kep. Seribu, Jakarta Utara.

Pihak pemerintah setempat menegaskan bahwa pantai adalah ruang publik, sehingga dapat didatangi oleh masyarakat umum, tanpa harus memberikan retribusi dalam bentuk apapun. Hal ini ditegaskan salah satu aparat pemerintah Kep. Seribu terkait penangkapan pungli yang dilakukan oleh warga lokal. Sehingga ancaman berupa pungli pada wisatawan oleh warga setempat, diharapkan pemerintah bisa segera dilaporkan pada aparat di wilayah itu.

METODE PENELITIAN

Keikutsertaan masyarakat/kelompok masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan pengembangan aplikasi jaringan. Upaya menggenjot partisipasi jaringan menggunakan metode partisipatif. Nasdian (2014) menyatakan terdapat beberapa pendekatan bantuan jaringan, antara lain metode swadaya, bantuan teknis, dan metode perang. Teknik *self-assist* mengkhususkan pada fungsi komunitas sebagai anggota dalam kegiatan kelompok. Pendekatan pendampingan teknis didasarkan pada keinginan para perencana yang dapat menyampaikan dan mengkaji prosedur pengembangan kelompok masyarakat/masyarakat.

Pengembangan jaringan di dalam masyarakat/kelompok masyarakat membutuhkan bantuan partisipatif. Nasdian (2014) membuat standar kategorisasi pendampingan sehingga bisa dikatakan sebagai bantuan partisipatif. Kategorisasi tersebut adalah (1) memuat faktor-faktor pembuatan rencana,

pelaksanaan, dan evaluasi; (2) metode partisipatif, dapat dilihat sebagai alat yang berdiri sendiri dengan kekuatan dan kelemahannya; (3) merupakan perangkat partisipatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan masyarakat/kelompok masyarakat.

Penelitian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), sebagai teknik pengumpulan data. Dipilihnya teknik ini disertai dengan harapan tingkat partisipasi melalui lintas dialog antara pemerintah, warga dan investor dapat secara terbuka mengungkap problematika yang ada di destinasi wisata. Pengertian pendekatan FGD erat kaitannya dengan penyebab utama atau justifikasi dari suatu penelitian. Hal yang mendasari penggunaan FGD adalah untuk menuai informasi/fakta yang kaya dalam kajian sosial dengan sifat yang multi aspek dari interaksi individu-individu dalam sebuah suatu masyarakat/kelompok masyarakat.

Definisi awal FGD sejalan dengan (Kitzinger & Barbour, 1999) yakni untuk menemukan temuan khusus dari diskusi kumpulan individu yang menitikberatkan pada kegiatan bersama, berbagai individu yang berada di dalamnya. Kegiatan individu-individu yang terlibat dalam kelompok-kelompok dialog tersebut meliputi interaksi dan komunikasi, dalam mengajukan pertanyaan, dan saling memberikan umpan balik tentang ulasan atau ulasan mereka tentang suatu masalah/masalah sosial yang

sedang menjadi fokus kajian penelitian yang sedang diteliti.

Teknik/cara analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Teknik analisis interaktif ini terdiri dari 3 hal: (1) reduksi/pengurangan informasi dan data; (2) penyajian informasi dan data (3) pengujian, serta penarikan informasi dan data yang diterima. Langkah pertama analisis, yakni reduksi data yang melibatkan dua tahap. Tahap (1) adalah tahap yang melibatkan tahap-tahap *editing*, kategorisasi, dan meringkas data. Sementara itu tahap (2) merupakan tahap penyusunan informasi dan data serta catatan-catatan mengenai seluruh hal termasuk kegiatan, sehingga peneliti dapat memunculkan dan menemukan pola data.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan evaluasi interaktif Miles dan Huberman. Metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman ini terdiri dari 3 aspek, yaitu (1) reduksi data/informasi; (2) penyajian statistik; dan (3) menarik dan memeriksa kesimpulan. Langkah pertama analisis, khususnya reduksi data dalam dua tahap. Tahap primer adalah tahap yang meliputi langkah-langkah mengedit, mengelompokkan, dan meringkas informasi. Sedangkan derajat kedua adalah tahap menyusun kode dan catatan mengenai berbagai hal yang terdiri dari kegiatan hingga prosedur sehingga peneliti dapat menemukan masalah, dan mampu mengelompokkan data.

Catatan tentang data atau fenomena tertentu dapat dibuat dalam bentuk narasi kalimat, satu paragraf hingga beberapa paragraf. Dalam tingkat akhir reduksi data dan informasi, peneliti menyusun penyebab yang terkait dengan tema dan model dan juga menyimpan (mengurangi) informasi yang sulit untuk diketahui tema dan pola (Miles & Huberman, dalam Pawito, 2007:104 -105).

Pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat subjektif, memiliki beberapa kelemahan diantaranya seperti subjektivitas peneliti sebagai partisipan observer, yang dalam penelitian, alat dan metode penelitian seperti wawancara mendalam dan observasi yang mengandung banyak kelemahan. Salah satu teknik dalam melakukan objektivitas pada penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui penerapan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah suatu cara mengecek objektivitas informasi/data dengan dengan menggunakan informasi/data lain di luar data primer yang telah diperoleh dalam wawancara. Triangulasi merupakan salah satu teknik yang dapat dimanfaatkan peneliti untuk mengecek ulang penelitiannya dengan cara mengkomparasi data primer, dengan berbagai sumber, metode atau teori. Triangulasi yang peneliti gunakan di dalam kajian ini adalah teknik triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber informasi dilaksanakan melalui evaluasi dan pengecekan informasi/data yang diterima melalui cara & metode khusus, yang dilakukan dengan cara:

(1) komparasi fakta hasil observasi dengan hasil *in depth interview*, (2) mengevaluasi apa yang disampaikan narasumber di ruang publik dengan pernyataan pribadi (3) mengevaluasi apa yang dikatakan narasumber dengan situasi dan kondisi (fenomena), (4) memeriksa serta membandingkan perspektif seseorang dengan tinjauan dan perspektif individu lain dengan kompetensi yang sesuai (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi draft informasi/data terkait lainnya. Hasil evaluasi yang diprediksi berupa persamaan atau alasan perbedaan (Bungin, 2011: 261-265).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Education Sustainable Development (ESD) bagi Penguatan Integritas Ekowisata Pulau Seribu

Education for Sustainable improvement (ESD) adalah suatu program/konsep, yang mewujudkan isu *sustainable improvement (SD)*. Program ini dimulai melalui komisi dunia untuk lingkungan dan perbaikan tahun 1987 (Keeble, 1988). Isu mengenai pendidikan terus berkembang, yang pada akhirnya dijadikan isu utama pada Konvensi Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro, pada tahun 1992.

Sustainable improvement (SD), adalah perkembangan dengan penitikberatan pada harmonisasi kehidupan manusia, sumber daya alam, dan lingkungan, serta mengintegrasikan isu-isu sosial lain seperti kemiskinan (*poverty*), kesetaraan gender,

HAM, Kesehatan (*healthy*), kesejahteraan manusia, dialog antarbudaya, dan isu-isu lainnya. Visi ESD menurut UNESCO “Menciptakan dunia yang sejahtera, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menerima pendidikan yang berkualitas nilai-nilai, sikap & perilaku, mendukung transformasi sosial di masa depan.”

Urgensi dari implementasi ESD, adalah mengajarkan individu agar mempunyai sikap & perilaku, kemampuan, dan informasi dengan maksud untuk membantu individu membuat pilihan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk saat ini dan dimasa yang akan datang. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, maka ESD bisa sangat relevan dengan gagasan pembelajaran signifikan, berdasarkan pengenalan induktif.

Secara kontekstual, ESD menekankan pada keinginan untuk menganalisis fenomena yang terjadi, memadukan aspek budaya, sosial, serta lingkungan dalam penguasaan, menekankan kurangnya penggunaan empati terkait dengan banyaknya permasalahan yang timbul bagi bumi, alam, dan lingkungan sekitarnya, serta mencari jawaban untuk masalah alam di sekitar mereka. Salah satu negara berhasil dalam menerapkan ESD, yakni Jepang. Jepang berperan pada *Decade of Education for Sustainable Development* (DESD), yang digunakan sebagai pedoman implementasi program ESD dari UNESCO, yang telah berjalan dari tahun 2005 hingga 2014. Saat ini, praktik ESD yang telah

diimplementasikan oleh negara Jepang, banyak ditiru/reduplikasi dan dikembangkan oleh banyak negara di dunia.

Usulan Proposal terkait ESD dibidang Ekowisata Kep. Seribu menjadi sebuah urgensitas penelitian yang harus dilanjutkan dengan pendekatan berbasis edukasi dan interpretasi budaya lokal. Hal ini didasarkan pada studi potensi dan tantangan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki integritas serta kredibilitas untuk memajukan kawasan wisata yang ramah publik, bebas pungli, aman dan konvergen dengan *smart destinasi* sebagai wisata internasional. Sasaran dari penelitian ini adalah warga pulau Tidung dan Pari.

Secara geografis, Pulau Tidung kecil memiliki letak lahan kurang lebih tujuh belas hektar, dikelilingi pantai yang landai dan berhiaskan pasir putih. Meski merupakan pulau dengan wilayah daratan yang cukup luas, akan tetapi Pulau Tidung Kecil bukan merupakan pulau yang tepat sebagai kawasan pemukiman. Bukan tanpa alasan, pihak berwenang membidik Pulau Tidung sebagai tempat agrowisata yang saat ini sedang maju dan dirawat dengan bantuan Sudin Pertanian, Kelautan dan Keamanan Pangan (Sudin KPKP) Kep. Seribu Selatan.

Pulau Pari memiliki tiga andalan, yaitu destinasi Pantai bahari Perawan, Pantai Dermaga Bukit Matahari, dan Pantai Pasir Kresek. Saat ini seluruh destinasi tersebut masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal. Pendapatan yang diterima

dari perusahaan pengelola pariwisata digunakan bagi pembangunan sarana, serta fasilitas dan akomodasi pariwisata, dan juga digunakan untuk biaya kebersihan dan pemeliharaan, di samping untuk pengadaan kegiatan-kegiatan sosial. Saat ini sudah banyak investor yang masuk, namun belum sepenuhnya memberdayakan lokalitas dan kemampuan masyarakat sekitar.

Selain memiliki keunggulan yang menjadi daya tarik utama, wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pari ditawarkan beberapa pilihan yang tersedia di desa wisata, yang dapat dinikmati dengan menggunakan sepeda, serta menyelam (*snorkeling*), dan menikmati pantai dengan menggunakan kano. Semua program dan pilihan paket wisata disiapkan oleh masyarakat lokal, sebagai penyedia layanan, seperti pengadaan peralatan, pelatihan oleh masyarakat, hingga penginapan/akomodasi.

Seluruh daya tarik yang ditawarkan oleh aspek pariwisata, tidak dapat berkembang tanpa dukungan dari seluruh pihak sebagai stakeholder-stakeholder pariwisata. Merujuk Rahadian A (2014), dalam kajian pembangunan nasional di seluruh aspek, diperlukan adanya suatu Sistem Integritas Nasional, yang dibangun sebagai solusi fundamental bagi upaya pengurangan hingga pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, Sejalan dengan Peraturan Perpres Nomor 55 Tahun 2012, mengenai Stranas PPK (Strategi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Korupsi).

Implementasi perangkat Integritas seluruh tanah air dilaksanakan pada setiap level elemen negara dan seluruh stakeholder, agar pemberantasan korupsi dapat terejawantahkan secara lebih terarah, dan menyeluruh. Implementasi sistem integritas nasional ini diprediksi mampu menjadi solusi dari sejumlah persoalan bangsa, diantaranya adalah tindak korupsi yang hingga saat ini menjadi penghambat utama tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Perangkat Integritas seluruh negara adalah elaborasi beberapa aspek integritas diantaranya integritas personal, integritas institusional, integritas kelembagaan antar institusi, yang menjadi landasan seluruh implementasi tata kelola negara, sehingga diharapkan dapat menciptakan *Good Governance* di Indonesia.

Secara teoritis, secara keseluruhan terhambatnya kemajuan aspek ekonomi, dampak negatif pada produktivitas individu, *negative latent effect* dan dampak negatif masif lainnya betul dapat terjadi, apabila tindak korupsi tidak segera diatasi (Mahmood, 2005; 62 dalam Rahadian A, 2014).

Lebih lanjut, Goolsarran (2006:61) menjelaskan bahwa korupsi menyebabkan sejumlah dampak pada sistem ekonomi di mana: (1) barang dan penawaran menjadi lebih mahal, akibatnya merugikan tempat tinggal yang agung dan disukai manusia; (2) perubahan yang terdistorsi karena keinginan untuk memiliki barang dan jasa yang dapat meningkatkan potensi penyuaapan/korupsi; (3)

penumpukan utang publik jangka panjang yang berlebihan karena kecenderungan pemerintah menggunakan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan negara; dan (4) terjadinya misalokasi sumber daya dan tidak diperhatikannya pembangunan pada sejumlah daerah yang membutuhkan prioritas pembangunan.

Sebagai sebuah riset aplikatif yang berusaha menerapkan kajian konvergen dengan metode ESD, teori terkait kepemimpinan menjadi teori substantif. Peneliti menempatkan Teori Klitgaard & Ramirez Torres, (Klitgaard, 2016), yang menyatakan bahwa *Monopoly of Power*, jika disertai dengan kekuatan/power berlebih yang dimiliki oleh seseorang, tanpa pengawasan (*minus accountability*), berpotensi menimbulkan korupsi. Pergantian pola pemerintahan, yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dengan diterapkannya otonomi daerah telah menggeser praktik korupsi yang dulunya paling didominasi melalui pemerintahan pusat menjadi meluas di daerah, hal tersebut sejalan dengan asumsi dasar teori Klitgaard, yang menyatakan bahwa korupsi mengikuti kekuasaan/power. Gambaran fenomena tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari (Rahadian A, 2014), bahwa seorang individu akan cenderung melakukan tindak korupsi, jika seseorang tersebut mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan menguntungkan dari tindak korupsi, dari hukuman/ganjaran yang diterima sebagai konsekuensi.

Selanjutnya, analisis pengembangan SDM Ekowisata melalui teori fungsionalisme struktural Parson, disertai dengan penggunaan skema penting mengenai fungsi seluruh sistem tindakan, skema tersebut dikenal dengan istilah AGIL. Menurut Jones (2009), Parson membagi empat fungsi inti yang dibutuhkan pada seluruh sistem sosial, meliputi *Adaptation (A)*, pencapaian tujuan atau *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latent Pattern Maintenance (L)*. Keempat hal tersebut wajib dimiliki agar suatu sistem dapat tetap bertahan (*survive*), jika dikaitkan dengan penelitian yang diproyeksikan dengan pendekatan ESD maka termuat konsep AGIL versi Talcott Parsons mengenai sistem dalam masyarakat di wilayah destinasi wisata Kep. Seribu, meliputi: (1) Fungsi adaptasi untuk penyesuaian semua lapisan stakeholder terhadap masyarakat dari segi ekonomi atau budaya maupun aktivitas promosi dan pelayanan wisata bahari lainnya, (2) Fungsi pelestarian cagar budaya dan ekosistem wisata bahari, (3) Fungsi integrasi. Fungsi ini dibutuhkan ketika terjadi interaksi antara pemerintah, pengusaha lokal, dan kelompok masyarakat, yang lebih harmonis, sehingga tujuan bersama yang telah ditetapkan dapat tercapai, (4) Fungsi latensi pada aspek budaya tetap harus dapat dikembangkan dengan baik sehingga pelestarian budaya dan perkembangan budaya kolektif dapat dilakukan.

Secara teoritis pendekatan organisme *behavioral* dianggap memiliki relevansi dalam membaca kondisi SDM dan potensi

ekowisata Kep. Seribu. Hal ini tidak lepas dari SDM yang dianalogikan sebagai suatu sistem tindakan eksternal yang menangani fungsi adaptasi dan mampu menyesuaikan diri dan mengubah aspek eksternal. Sistem sosial yang ada pada masyarakat di Kep. Seribu harus terintegrasi dan berperan melakukan pengontrolan aspek aspek yang ada di sekitarnya. Sistem kultural berperan dalam menerapkan fungsi latensi sebagai landasan/modal awal individu sekaligus aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak positif. Dalam proses dialektis terjadi pendekatan ESD diharapkan mampu secara humanis mengungkap persoalan yang muncul pada aspek pariwisata di Kep. Seribu, sehingga seperangkat solusi dapat dihasilkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dihasilkan adalah, dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia (dalam konteks nasional), menurut (Widjajabrata & Zacchea, 2004:34) penguatan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) ekowisata, harus terlepas dari pemikiran dan tindakan korupsi yang melekat di hampir setiap aspek pengembangan. Korupsi telah banyak dampak negatif, dua dampak negatif korupsi yang terlihat jelas pada aspek perekonomian: (1) korupsi merupakan kendala terbesar dan utama dari perkembangan aspek ekonomi, dan pertumbuhan sektor investasi baik bagi investor dalam dan luar negeri; serta

(2) Tindak korupsi memiliki multiplier effect negative berkelanjutan dan bersifat laten pada seluruh aspek kehidupan. Lebih lanjut, Basyaib, Holloway & Makarim (2003) menyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara dalam aspek ekonomi, tetapi juga melanggar serta menghilangkan hak-hak sosial, merusak kesejahteraan masyarakat & demokrasi, merusak supremasi regulasi, serta berpotensi menghentikan perkembangan pembangunan nasional (Rahadian A, 2014). Pada model yang dihasilkan melalui penelitian ini, kesadaran mengenai pengembangan destinasi wisata sebagai mata utama pendapatan, masyarakat dapat diperdalam dengan nilai nasionalisme, sehingga integritas Sumber Daya Manusia (SDM) ekowisata dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R. (2020). Semua Pulau Wisata di Kepulauan Seribu Sudah Buka Kembali. *Kompas.Com*.
<https://travel.kompas.com/read/2020/08/16/111012127/semua-pulau-wisata-di-kepulauan-seribu-sudah-buka-kembali?page=all>
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi Kedu). Kencana Prenada Media Group.
- Goalsarran, S. A. (2006). Corruption: Its Nature, Causes and Effects Suggestions on the Way Forward. *The Journal of Government Financial Management*,

- 55(1).
- Jones, P. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*. Yayasan Obor Indonesia.
- Keeble, B. R. (1988). The Brundtland Report: "Our Common Future." *Medicine and War*, 4(1), 17–25.
<https://doi.org/10.1080/07488008808408783>
- Kemenparekraf. (2019). *Renstra Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024*. Kemenparekraf.
- Kitzinger, J., & Barbour, R. S. (1999). *Developing Focus Group Research: Politics, Theory and Practice*. Sage Publication.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pawito, P. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. LKiS Yogyakarta.
- Petrus, A. (2019). *Bupati Kepulauan Seribu Lanjutkan Pembangunan Bandara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*.
- Rahadian A, H. (2014). Prosiding Seminar Sistem Integritas Nasional Sebagai Kebijakan Mencegah Dan Memberantas Korupsi Di Indonesia. *Stiami*, 1(2).
- Sembiring, I. G. N. (2021). Kunjungan Wisatawan di Kepulauan Seribu Turun 33 Persen akibat Pandemi. *Kompas.Com*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/18075311/kunjungan-wisatawan-di-kepulauan-seribu-turun-33-persen-akibat-pandemi>
- Widjajabrata, S., & Zachea, N. M. (2004). International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditor to Battle Corruption. *The Journal of Government Financial Management*, 53(3), 34–43.